

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang seringkali didefinisikan dengan perubahan menuju kearah yang lebih baik ternyata memiliki banyak indikator agar kenyataan dilapangan sesuai dengan defenisinya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri masyarakat, mutu pendidikan yang baik, rendahnya tingkat kesenjangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus semakin meningkat menjadi beberapa indikator yang harus tercapai agar suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil (Budiman, 2000:8).

Hakekatnya tujuan pembangunan nasional dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai

pelaksana pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pemerintah Desa berkewenangan melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada, atau potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. (Ndraha, 2017 : 83)

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diharapkan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Demi mewujudkan hal tersebut maka pemerintah mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa. Indikasi bahwa pemerintah desa telah diberikan kewenangan sangat besar, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya bahwa pemerintah melalui Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tersebut. Kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemeritahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan program nawacita yang dijalankan pemerintahan saat ini dimana salah satu isinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. (Undang-Undang No 6 tahun 2014 ayat 26 pasal 1),

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) dari pada proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau yang dilaksanakan.

Paradigma pembangunan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Lebih lanjut, menurut Laksana, *good governance* menekankan bahwa pemerintah harus

mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang. (Laksana, 2013: 56).

Pelaksanaan program pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan melalui suatu pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mampu mendorong, memotivasi menciptakan akses agar masyarakat desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini diatur pada pasal 81 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dimana pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah dengan baik sebagai wujud dari amanat pemerintah, desa untuk dapat menyusun strategi dalam membangun desanya bersama rakyat, adanya strategi ini dapat direncanakan pembangunan desa yang optimal sesuai dengan keinginan masyarakat desa, dengan mengajak berbagai elemen masyarakat desa, serta organisasi desa maupun BPD, termasuk penyampaian pembangunan desa disampaikan melalui media sosial.

Sosial media mempunyai peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Konteks sosial media (Sosmed) ini merupakan komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau saluran penyampaian ide dan gagasan pembangunan. Tidak sedikit proses pembangunan menghadapi kegagalan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, hanya karena kurangnya aspek komunikasi dalam penerapannya.(Zulkarnain, 2016 : 142).

Pembangunan melalui sosial media untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kecerdasan. Dalam proses pembangunan masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek, tetapi lebih sebagai subjek (Soetomo, 2017 : 7).

Sebagaimana pada Pemerintah Desa Manding Daya Kecamatan Manding, dalam membangun desa bersama masyarakat desa, telah memanfaatkan teknologi modern yang saat ini paling banyak diminati masyarakat dengan menerapkan webse, wa, maupun media elektornik

lainnya, hal ini untuk mempermudah dalam mengakses pembangunan yang ada di Pemerintahan Desa. Pelaksanaan dan perumusan program pembangunan partisipasi masyarakat turut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat agar berpartisipasi baik secara mandiri maupun berkelompok. Pada era modern sekarang ini Pemerintah Desa Manding Daya, program pembangunan desa yang telah dirumuskan dengan menggunakan strategi pembangunan melalui sosial media. Sosial media yang ada pada Desa Manding Daya Blog Desa Manding Daya yaitu “Santai Bersinar” Blog:<https://desamandingdayablogspot.com/> Email: madayasantai@gmail.com IG:DesaMandingDaya, maka dari itu masyarakat Manding Daya tinggal membuka link alamat sosmed berbagai informasi terkait pembangunan desa yaitu perumusan dan pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan Covid 19, kesemuanya sudah bisa diketahui pembangunan yang ada di Desa Manding Daya.

Pembangunan melalui sosial media sangat diperlukan agar masyarakat memahami apa yang telah direncanakan sejak awal akan membantu membangun perubahan kehidupan masyarakat kedepan yang lebih baik. Bentuk pembangunan melalui sosial media yang diberikan Pemerintah Desa Manding Daya melalui 1). Rapat Bulanan RT, RW dan BPD, 2) Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdesa), 3) Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dan 4). Publikasi dengan media online termasuk 5) surat keterangan administrasi yang diberikan Pemerintah Desa Manding Daya.

Bentuk strategi pembangunan melalui sosial media yang dilakukan Pemerintah Desa Manding Daya dalam meningkatkan pembangunan desa di era teknologi canggih ini memang sangat baik yang secara langsung diketahui oleh masyarakat yang membuka blog tersebut, artinya masyarakat tidak perlu susah payah mengikuti sosialisasi secara langsung di Pemerintah Desa Manding Daya.

Strategi pembangunan melalui sosial media yang dibangun Pemerintah Desa Manding Daya merupakan manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi yang dimaksud berupa staretgi secara makro (*planed multimedia strategy*) yang mempunyai fungsi ganda, yaitu menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal, serta menjembatani *cultural gap* akibat kesenjangan informasi yang ditimbulkan media massa. (Effendy, 2016 : 93)

Salah satu bentuk strategi pembangunan melalui sosial media di Desa Manding Daya, selain dipasang melalui banner di depan Kantor Pemerintahan Desa Manding Daya, juga melalui sosial media yang dimasukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Sosialisasi Penganggaran Pembangunan Desa
Desa Manding Daya Kecamatan Manding

No	Uraian	Anggaran	Sumber
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60,602,000	APBdes
	Sub Bidang Kependudukan	12,780,000	DD
	Sub Bidang Tata Praja	47,822,000	DD
2.	Bidang Pembinaan Masyarakat	23,775,000	
	Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	20,000,000	DD
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3,775,000	DD
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3,500,000	
	Sub Bidang Peningkatan Aparatur	1,500,000	DD
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	2,000,000	DD
3.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	733,648,173	
	Sub Bidang Kesehatan	260,549,673	DD
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	432,498,500	DD
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40,000,000	DD
	Sub Bidang Informasi Publik Desa	600,000	DD
4.	Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak	94,573,140	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	94,573,140	
	a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	90,000,000	DD
	b. Bantuan Bahan Pangan/Sembako	4,573,140	DD

Sumber : Pemerintah Desa Manding Daya, 2021

Data diatas menunjukkan adanya penguatan masyarakat Manding Daya melalui sosial media pada strategi pembangunan Desa yang telah dianggarkan dalam musyawarah desa dan musrenbangdesa yang pada dasarnya memperkuat potensi masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan lebih meningkat dan kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

Pemerintah Desa Manding, dalam melakukan sosial media untuk pembangunan desanya, setidaknya memperhatikan karakteristik masyarakatnya bahwa masyarakat desa Manding Daya kebanyakan petani dan masyarakat pedesaan, sehingga untuk membuka istagram atau bolg spot Pemerintah Manding Daya sangat tidak mungkin, karena

anggapan masyarakat desa lebih bekerja, bertani menghasilkan uang dari pada membuka istagram atau internet pada Pemerintah Desa manding Daya. Masyarakatpun tidak diajak dalam membangun desa termasuk pada kegiatan lainnya, dan hanya tertentu saja masyarakat yang ikut partisipasi dalam pembangunan desa. Media sosial yang dilakukan Desa Manding Daya kurang optimal, karena sosialisasi yang demikian hanya diketahui orang tertentu, sedangkan masyarakat Manding Daya secara keseluruhan tidak tahu ada pembangunan di Desa Manding Daya ataupun sebaliknya masyarakat desa kurang merepons atau ikut berpartisipasi dalam program yang digalakkan oleh pemerintah desa.

Sebagaimana observasi yang dilakukan peneliti, Pemerintah Desa Manding Daya, masih kurang dalam memberikan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui sosial media kepada masyarakat tentang Pembangunan Desa, terlihat masyarakat desa yang jauh dari Balai Desa tidak tahu pembangunan Desa Manding Daya. Meskipun pada saat ini Desa Manding Daya telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui HP atau WA, tetapi strategi pemerintah dalam penyampaian informasi melalui media sosial sebagai sarana sosialisasi informasi kepada masyarakat dalam program pembangunan desa masih kurang tersampaikan dan masih kurang tepat dari hasil-hasil program pembangunan, karena tidak semua masyarakat Desa Manding Daya mengerti tentang media sosial sebagaimana yang dilakukan aparat desa Manding Daya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Strategi Pembangunan Desa Melalui Sosial Media (Studi Pada Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Strategi Pembangunan Desa Melalui Sosial Media Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang pada dasarnya hendak menjawab rumusan masalah, adalah : Untuk Mengetahui Strategi Pembangunan Desa Melalui Sosial Media di Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian aspek teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti berkaitan dengan Strategi Peningkatan Pembangunan Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian dari aspek praktis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang peran sosial media dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Desa.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan informasi untuk masyarakat luas untuk mengetahui pembangunan desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Manding Daya.

c. Bagi instansi terkait

Penelitian di harapkan dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk selalu mengedepankan pembangunan perdesaan .

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) yang memperlihatkan persamaan dan perbedaan, dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari strategi pembangunan desa melalui media sosial di Desa Manding Daya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.